

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL
KABUPATEN / KOTA DI PROPINSI JAWA BARAT
TAHUN 2017-2021**

Thomas Nadeak, SE., MM¹, Lita Sari²,

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Universitas Buana Perjuangan Karawang

thomas.nadeak@ubpkarawang.ac.id¹ ak18.litasari@mhs.ubpkarawang.ac.id

PENDAHULUAN

Kewenangan otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah melalui Ketetapan MPR nomer IV/mpr/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dan ketetapan MPR IV/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA merekomendasikan pada pemerintah dan dewan perwakilan rakyat agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pelaksanaan Otonomi di Daerah Indonesia. Bersama dengan terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan sela-sela Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan program otonomi agar melaksanakan pelayanan publik disegala bidang dan diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Program tersebut bertujuan untuk lebih mendedikasikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan

mempermudah masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Otonomi Daerah sendiri merupakan perwujudan dari asa desentralisasi fisik. Belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung yang termasuk ke dalam belanja Daerah serta didanai oleh pendapatan Daerah, sehingga besar kecilnya pendapatan Daerah akan mempengaruhi belanja modal dalam Peraturan Menteri Pasal 50 dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 yang mengatur tentang pedoman keuangan Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Dari pengertian tersebut belanja modal sebagai pembentukan modal yang memiliki sifat menambah aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun atau lebih dari satu periode akuntansi termasuk pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas aset sebagai biaya pemeliharaan yang bersifat menambah atau mempertahankan masa manfaat.

Keberhasilan pembangunan Daerah dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja modal dengan penyerapan anggarannya. Terserapnya belanja modal secara optimal akan meningkatkan dan memperbaiki pengadaan aset tetap dengan masa manfaat lebih dari satu tahun. Akan tetapi, berdasarkan data belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2017 sampai dengan 2021 terjadi fenomena penurunan jumlah anggaran dan realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan pada tahun 2020, dan mengalami kenaikan pada Tahun 2021 terlihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jawa Barat Tahun 2017-2021
Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Milyar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	Rp 17.727,67	Rp 18.525,80	104.50%
2018	Rp 18.157,75	Rp 17.845,53	98.28%
2019	Rp 17.923,11	Rp 19.634,12	109.55%
2020	Rp 19.323,05	Rp 14.070,13	73.16%
2021	Rp 43.784,98	Rp 38.241,26	87.34%

Sumber: Kemkeu, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, pada tahun 2020 Belanja Modal mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan berdampak bagi sektor-sektor yang menggunakannya. Dengan adanya pembatasan beraktivitas, tingkat keterpaparan masyarakat yang cukup tinggi, serta sektor unggulan di bidang pariwisata, industri pengolahan, dll. Namun demikian terdapat beberapa daerah yang PAD tetap tumbuh positif dikarenakan sektor utamanya di bidang pertanian serta bidang lain yang kurang terdampak dan/atau tingkat keterpaparan yang tidak terlalu tinggi sehingga tidak diberlakukan pembatasan beraktivitas secara terus-menerus.

Tabel 1. 2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Tahun 2017-2021 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Milyar Rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2017	Rp 35.987,68	Rp 41.400,15	115.07%
2018	Rp 38.780,87	Rp 40.240,46	103.77%
2019	Rp 43.049,79	Rp 44.150,91	102.56%
2020	Rp 50.219,92	Rp 39.915,36	79.48%
2021	Rp 49.585,57	Rp 41.729,00	84.16%

Sumber: Kemenkeu, 2021

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, seperti yang dapat dilihat pada tabel anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Tahun 2017-2019 telah melebihi target yang telah ditentukan, artinya anggaran yang terealisasi tercapai dengan baik. Fenomena yang terjadi pada tahun 2020-2021 realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah mengalami ketidaksesuaian antara anggaran dengan realisasi. Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 hingga 23,08% disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi daerah.

Dampak dari Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya kenaikan angka kemiskinan, berkurangnya pendapatan masyarakat, meningkatnya angka pengangguran menurut BPS RI, (2020). Selain itu, pendapatan Asli Daerah tidak

mencapai target pada tahun 2020, yang mana dari target anggaran Rp 50.219,92 Miliar, Sedangkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi hanya mencapai Rp 39.915,36 miliar. Sehingga, pada tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, akan tetapi realisasi anggaran tidak tercapai dengan baik.

Tabel 1. 3
Anggaran dan Realisasi DAU dan DAK Jawa Barat Tahun 2017-2021
Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi (Milyar Rupiah)

Tahun	Dana Alokasi Umum			Dana Alokasi Khusus		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2017	Rp34.326,27	Rp34.326,27	100%	Rp20.411,66	Rp19.209,01	90,65%
2018	Rp34.413,90	Rp34.413,90	100%	Rp20.650,65	Rp19.692,91	94,06%
2019	Rp36.398,86	Rp38.398,22	99,97%	Rp22.352,09	Rp21.021,05	92,69%
2020	Rp33.168,32	Rp32.798,66	98,89%	Rp21.856,82	Rp21.326,08	95,01%
2021	Rp32.619,06	Rp32.619,06	100%	Rp22.460,03	Rp21.586,11	91,70%

Sumber: Kemenkeu, 2021

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas bahwa realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) pada tahun 2017 s.d. 2018 mencapai kesetabilan anggaran dan realisasi. Fenomena terjadinya kenaikan pengeluaran Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2019, disebabkan adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak di berbagai daerah. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2017 s.d. 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya akan tetapi tidak melebihi dana yang telah dianggarkan, adanya efisiensi biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan yang sama yang direncanakan. Fenomena melonjaknya kasus pandemi Covid-19 pada tahun 2020 mengalami pemotongan belanja modal, yang disebabkan oleh Covid-19 sehingga dialokasikan kepada kebutuhan umum/Nasional. Pada tahun 2019 DAU dan DAK mengalami peningkatan 6,57% penyaluran dana transfer ke daerah dan Dana Desa hal ini tidak berpengaruh

signifikan terhadap perubahan ekonomi dialokasikan kepada kegiatan konsumtif dan sfekulatif, termasuk pada situasi politik dengan penyelenggaran Pilkada serentak diberbagai daerah, dana yang sudah ditransfer pemda akan digunakan sebagian untuk kegiatan proyek/belanja modal yang dibelanjakan daerahnya untuk pengadaan barang dan jasa, menurut Kajian Fisikal Regional (2019)

Pada tahun 2020 Dana Alokasi Umum mengalami Penurunan sehingga Anggaran teralisasi dengan baik, begitupula dengan Dana Alokasi Khusus. Pada tahun 2021 alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) digunakan DAU sebesar 48,04% dan DAK sebesar 28,07%. DAU di peruntukan untuk belanja modal. DAK fisik mencatat realisasi terendah dikarenakan nilai anggaran alokasi TKDD ini juga termasuk penanganan Covid-19 sesuai dengan kebijakan yang merajuk pada edaran No 903/4253A/S dan SE-2/MK/072021 tentang Percepatan *Refocusing* Realokasi Pendapatan dan Belanja Pemda Dari Penanganan Pandemi Covid-19. DAU dan DAK mendukung pelaksanaan Vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, dan belanja lainnya, menurut Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat (2022).

Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia merekomendasikan langkah-langkah jarak sosial dan *telecommuting* untuk mengurangi penyebaran COVID-19, terutama melalui pengurangan atau penghentian sementara aktivitas pribadi. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi ini terjadi pada penerimaan pemerintah dari sisi perdagangan dalam negeri, seiring dengan kontraksi ekonomi pada tahun 2020 akibat pembebanan sementara kegiatan yang mempengaruhi beberapa sektor seperti pariwisata, transportasi dan manufaktur. Sedangkan pemerintah lebih banyak mengeluarkan dana untuk pelayanan kesehatan dan sosial. Di Indonesia sendiri, karena masalah COVID-19 telah menimbulkan banyak dampak, maka dengan pengurangan biaya APBD di setiap wilayah Indonesia dan pengurangan APBD, belanja modal belum terealisasi dengan baik dan belanja modal yang berdampak pada infrastruktur belum berhasil yang

ditinjau dari pembangunan di masing-masing Daerah menurut Kemenkeu, (2020). Sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Penelitian Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut, menurut Afrah Junita et al, (2021) pada Penelitian di Kota Langsa, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh Belanja Modal di Kota Langsa, sedangkan variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. Secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kota Langsa, kemudian Siti Hajar Asmawiah et al, (2022) menyatakan variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap variabel Belanja modal artinya semakin tinggi pendapatan daerah yang diperoleh maka semakin meningkat juga Belanja Modal yang akan dilakukan, Penelitian pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Hal ini didasarkan pada penelitian di atas dan fenomena yang terjadi dalam penggaran dan ralisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan reflika dari penelitian Siti Hajar A Et al, (2022) yang meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Dapat disimpulkan adanya kesenjangan dari penelitian sebelumnya serta adanya ketidakkonsistenan. Tingkat ketergantungan Pendapatan Asli Daerah yang bersifat fluktuasi dan terdapat ketidaksesuaian antara kenaikan/penurunan yang terjadi dalam penganggaran dan realisasi Belanja Modal. Penelitian ini termotivasi untuk menambahkan Judul variabel, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017-2021”.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang telah diutarakan di atas maka dari itu penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data memastikan bahwa keadaan Penurunan PAD, DAU, dan DAK tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
2. Terdapat penurunan jumlah anggaran Belanja Modal pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.
3. Terdapat kenaikan anggaran pengeluaran Dana Alokasi Umum pada tahun 2019 yang disebabkan oleh Pilkada serentak.
4. Terdapat ketidaksesuaian Anggaran terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada Tahun 2020-2021.
5. Pada tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal mengalami penurunan, Sedangkan Dana Alokasi Khusus mengalami Kenaikan yang diperuntukan kebutuhan Nasional Pandemi COVID-19.

Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ialah:

1. Ruang lingkup permasalahan penelitian terkait Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
2. Objek penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
3. Dalam penelitian ini, periode penelitian yaitu tahun 2017-2021.
4. Sumber data diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021?

Karawang, 28 Februari 2023

3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021?

Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021?

Target Luaran

Adapun Target luaran adalah Artikel Ilmiah pada jurnal Nasional dan Presentasi Seminar Nasional.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Teori federalisme fiskal adalah teori yang menjelaskan hubungan desentralisasi dengan perekonomian, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam berbagai kajian tentang federalisme fiskal *fiscal federalism*, terdapat dua perspektif teoritis yang menjelaskan dampak ekonomi dari desentralisasi, yaitu teori tradisional teori generasi kedua dan teori desentralisasi tradisional, teori perspektif baru generasi kedua. Teori Federalisme fiskal menawarkan model normatif yang menggambarkan pemerintah pusat sebagai penafsir yang bijaksana dari kehendak rakyat, memberikan pedoman dalam pengaturan kelembagaan antar pemerintah untuk memastikan bahwa lembaga pemerintah Daerah beroperasi sesuai dengan keinginan pusat (dengan asumsi kehendak semua warga negara). Studi kompetensi pengeluaran pada instrumen pendapatan untuk dialokasikan pada elemen-elemen masyarakat. Berawal dari sebuah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk semua negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal. Jadi federalisme fiskal merupakan perangkat prinsip pedoman untuk rancang keuangan tingkat nasional dan subnasional pemerintah menurut Affifah Fauziah Amalia dan Heryanto (2019).

Menurut Fahlevi, (2017), Untuk itu, PAD memegang peranan penting. Sumber

pendanaan dapat menilai keberhasilan Daerah dalam kegiatan pemerintahan dan pendanaan pembangunan Daerah.

Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Yudia Sari & Wirama, (2018) DAU merupakan salah satu sumber untuk menambah belanja modal. Menurut Karyadi, (2017). DAU menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah.

Daerah adalah kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar umum yang dimaksudkan disini meliputi:

- a. Layanan kesehatan,
- b. Layanan pendidikan,
- c. Penyediaan infrastruktur, dan
- d. Pengentasan kemiskinan,

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 Dana Perimbangan Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi Daerah, luas Daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di Daerah, sehingga perbedaan antara Daerah yang maju dengan Daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.

Dana Alokasi Khusus

Menurut PMK No.50/PMK.70/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. Dana alokasi Khusus dikelompokkan menjadi DAK

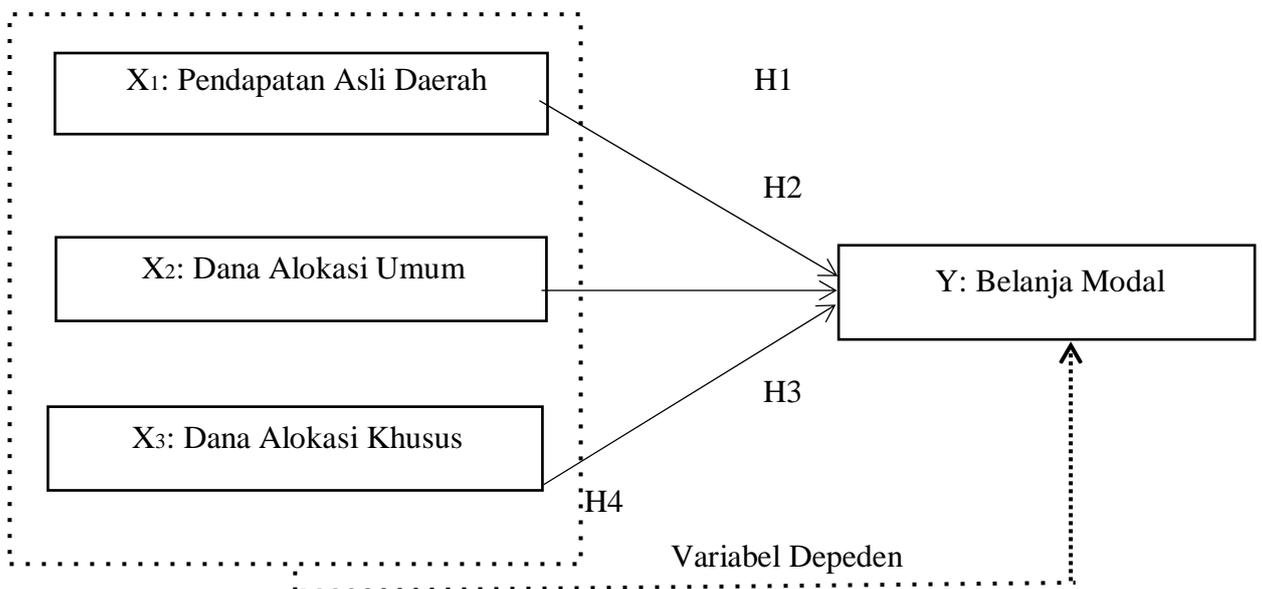
Fisik dan Non Fisik. Menurut Bahar (2019: 156), yaitu Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang masih belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah. Yang dimaksud Daerah tertentu adalah alokasi DAK. Dengan demikian tidak semua Daerah mendapatkannya. Pemerintah menetapkan tiga kriteria bagi suatu Daerah agar mendapatkan DAK, yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kerangka Pikiran

Berdasarkan Kerangka berpikir, maka dapat digambarkan variabel Independen dan variabel Dependen Sebagai berikut:

Variabel

Independen



Gambar 2. 1 Kerangka Pikiran

Keterangan:



Karawang, 28 Februari 2023

- | | |
|---|---|
| : Pengaruh variabel X
secara parsial
terhadap Belanja | Modal
: Pengaruh Variabel X
secara simultan
Terhadap Belanja Modal |
|---|---|

X₁ Pendapatan Asli Daerah

X₂ : Dana Alokasi Umum

X₃ : Dana Alokasi Khusus

H₁ : Hubungan Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal

H₂ : Hubungan Dana Alokasi Umum Dengan Belanja Modal

H₃ : Hubungan Dana Alokasi Khusus Dengan Belanja Modal

H₄ : Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Aloasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat yang disimpulkan dari tinjauan pustaka dan merupakan uraian sementara dari permasalahan yang perlu diujikan kembali. Suatu hipotesis akan diterima jika hasil analisis data empiris membuktikan bahwa hipotesis tersebut benar, begitu pula sebaliknya

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2018), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Teori federasi fisik berpendapat bahwa hubungan perekonomian, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan satu peranan penting dalam mengelola keuangan daerah. Penerimaan PAD adalah penerimaan daerah dalam mewujudkan desentralisasi, sumber penerimaan daerah dari PAD mampu merealisasikan dengan adanya pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan Belanja Modal. Bentuk pelayanan dari pemerintah untuk masyarakat seperti ditambah/diperbaikinya insfraktur, dan sarana prasarana yang mampu

mendorong perekonomian didaerahnya. Dengan begitu suatu daerah dapat mensejahterakan masyarakat baik dengan pelayanan jasa maupun pelayanan barang.

H1: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintah dan Pemerintah Daerah Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Teori federasi fisik berpendapat bahwa hubungan perekonomian, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Daerah dapat memakai dana transfer yang berupa bantuan Dana Alokasi Umum yang digunakan untuk penyediaan fasilitas dan pelayanan yang terbaik melalui Belanja Modal. Semakin besar DAU yang diberikan dari pusat, maka semakin besar juga penyediaan dan pengadaan pelayanan dan fasilitas publik yang terbaik melalui Belanja Modal daerah. Dana Alokasi Umum dikelola secara penuh oleh pemerintah daerah didalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan suatu daerah.

Dengan demikian penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berdampak positif terhadap Belanja Modal oleh Meltia, (2021). Penelitian sebelumnya juga menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal oleh Pramundita B Fatia, (2020). Begitupula penelitian pendukung oleh Suryana, (2019) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Dana Alokasi Umum Berpengaruh Positif Terhadap Belanja Modal pengaruh Dana Alokasi khusus Terhadap Belanja Modal

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Teori federasi fisik berpendapat bahwa hubungan perekonomian, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa daerah yang akan menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNS daerah.

H3: Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Alokasi Khusus selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Belanja Modal adalah belanja pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan Daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin lebih dari satu tahun seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi dan umum. Dengan Pengukuran menggunakan rasio.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat Penelitian ini adalah, Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.
2. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.
3. Untuk Menguji dan Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021.
4. Untuk Menguji dan Menganalisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah

Hasil penelitian ini akan menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan bagi pembaca dalam menguji pengetahuan mengenai pengaruh pendapatan pokok menurut daerah, dana alokasi umum, alokasi khusus untuk belanja modal di suatu daerah tertentu.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah spesifikasi yang direncanakan secara sistematis dari awal penelitian hingga pembuatan desain penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan teori dan hukum realitas yang dikembangkan dengan menggunakan model dan teori matematika. Suatu jenis penelitian yang terstruktur dengan baik atau hipotesis. Survei ini juga menggunakan jenis survei deskriptif. Studi deskriptif adalah studi masalah berupa fakta terkini dari populasi, termasuk kegiatan untuk mengumpulkan sikap dan pendapat individu.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini merupakan objek yang dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan mengambil data Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Barat selama periode 2017-2021 yang di peroleh melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang di publish www.djpk.kemenkeu.go.id.

Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian di laksanakan 6 (enam) bulan mulai dari bulan Maret 2022 hingga Agustus 2022.

Definisi Oprasional Variabel

Definisi Opasional variabel Secara Spesifik. Definisi Operasional memudahkan peneliti untuk menentukan cara mengukur variabel, menentukan indikator yang lebih spesifik, dan memudahkan pengukuran dan pengujian empiris. efinisi operasional adalah panduan yang memberi tahu peneliti bagaimana mengukur definisi oprasional variabel dalam penelitian ini terkait variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) serta Belanja Modal (Y) dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Independen “Pendapatan Asli Daerah (X1)”	Menurut PP Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pendapatan yang didapatkan oleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.	Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah	Rasio
Independen “Dana	Menurut PP Nomor 55 tahun 2005 Dana Alokasi	Celah Fiskal + Alokasi Dasar	Rasio

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Alokasi Umum (X2)”	Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan Kemampuan Keuangan antar Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Untuk mendapatkan Celah Fisikal: $\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$	
Independen “Dana Alokasi Khusus (X3)”	Menurut Kemenkeu Dana Alokasi Khusus (DAK) dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk memadai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.	$\text{DAK} = \frac{\text{Bobot Daerah}}{\text{Bobot Teknis}}$	Rasio

<p>Dependen “Belanja Modal (Y)”</p>	<p>Menurut PP Nomor 33 Tahun 2004 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.</p>	<p>Belanja modal = Kenaikan bersih dalam aset tetap + Beban penyusutan</p> <p>Untuk mendapatkan aset tetap:</p> <p>Kenaikan bersih aset tetap = Aset tetap pada akhir tahun – Aset tetap pada awal tahun</p>	<p>Rasio</p>
--	--	--	--------------

Sumber: diperoleh dari berbagai jurnal

Variabel Belanja Modal

Menurut Sugiyono (2017) variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dengan demikian, variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X₁), Dana Alokasi Umum(X₂) dan Dana Alokasi Khusus(X₃).

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja modal} = \text{Kenaikan bersih dalam aset tetap} + \text{Beban penyusutan}$$

Untuk mendapatkan aset tetap:

$$\text{Kenaikan bersih aset tetap} = \text{Aset tetap pada akhir tahun} - \text{Aset tetap pada awal tahun}$$

Variabel Pendapatan Asli Daerah

Menurut Sugiyono (2017) variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dengan demikian, variabel bebas dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

$$\text{Pendapatan} = \text{Total Pajak Daerah} + \text{Total Retribusi Daerah} + \text{Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan} + \text{lain – lain pendapatan Daerah yang sah}$$

Variabel Dana Alokasi Umum

Menurut Sugiyono (2017) variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dengan demikian, variabel bebas dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk *block grant*, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Daerah. Persentase Pembagian DAU antara Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah 10% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Provinsi dan 90% dari total DAU Nasional dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Perhitungan besaran DAU secara nasional adalah minimal 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto (PDN Netto). PDN Netto adalah Pendapatan Dalam Negeri dikurangi dengan Bagi Hasil yang diberikan Pusat kepada Daerah. Besaran alokasi DAU per Daerah dihitung menggunakan rumus/formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Variabel Dana Alokasi Umum bisa di ukur dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{DAU} &= \text{Celah Fiskal} + \\ \text{kabupaten/Kota} & \text{Alokasi Dasar} \\ & \text{Unruk} \\ & \text{mendapatkan} \\ & \text{Celah Fiskal:} \\ & \text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan} \\ & \text{Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal} \end{aligned}$$

Variabel Dana Alokasi Khusus

Menurut Sugiyono (2017) variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dengan demikian, variabel bebas dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK untuk masing-masing pemerintah provinsi dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Dana Alokasi Khusus

Bobot Daerah
=
Bobot Teknis

Populasi, Sampel, Teknik Pengumpulan Data

Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono, (2017). Dalam suatu Penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 27 Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat periode Tahun 2017–2021.

Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal pada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di Jawa barat, sehingga dari Populasi 27 Kabupaten/Kota akan diambil sampel sebanyak 18 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Barat.

Tabel 4.2
Daftar Sampel Penelitian

No.	Kabupaten/Kota	Periode Tahun
1.	Kabupaten Bogor	2017-2021
2.	Kabupaten Sukabumi	2017-2021
3.	Kabupaten Cianjur	2017-2021
4.	Kabupaten Bandung	2017-2021
5.	Kabupaten Garut	2017-2021
6.	Kabupaten Tasikmalaya	2017-2021
7.	Kabupaten Ciamis	2017-2021
8.	Kabupaten Kuningan	2017-2021
9.	Kabupaten Cirebon	2017-2021
10.	Kabupaten Majalengka	2017-2021
11.	Kabupaten Sumedang	2017-2021
12.	Kabupaten Indramayu	2017-2021
13.	Kabupaten Subang	2017-2021
14.	Kabupaten Purwakarta	2017-2021
15.	Kabupaten Karawang	2017-2021
16.	Kabupaten Bekasi	2017-2021
17.	Kabupaten Bandung Barat	2017-2021

Karawang, 28 Februari 2023

18.	Kabupaten Pangandaran	2017-2021
19.	Kota Bogor	2017-2021
20.	Kota Sukabumi	2017-2021
21.	Kota Bandung	2017-2021
22.	Kota Cirebon	2017-2021
23.	Kota Bekasi	2017-2021
24.	Kota Depok	2017-2021
25.	Kota Cimahi	2017-2021
26.	Kota Tasikmalaya	2017-2021
27.	Kota Banjar	2017-2021

Sumber Data: BPS

Pengumpulan Data Penelitian

Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yang didapat melalui media perantara, baik berupa data yang dipublikasi, studi kepustakaan, atau literatur terkait dengan materi penelitian yang sedang dilakukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2021 yang telah dipublikasikan secara berkala.

Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data terkait Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal dalam laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2021

Tabel 4. 3
Kriteria Sampel

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1.	Kabupaten dan Kota	27
2.	Tahun Pengamatan	5
3.	Jumlah Sampel (27*5)	135

Karawang, 28 Februari 2023

4.	<i>Missing data</i>	0
Total sampel yang telah digunakan		135

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id> hasil olah 2022

Instrumen Penelitian

Dalam data penelitian ini adalah data sekunder. Pemerolehan data dilakukan dengan mengunjungi situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Masing-masing variabel diperoleh berdasarkan instrumen penelitian sebelumnya yang didasari oleh sumbernya dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah.

Analisis Data

Teknis Analisis dapat merupakan suatu strategi atau cara untuk menyiapkan data menjadi informasi sehingga informasi tersebut terbuka secara efektif dan berharga untuk digunakan dalam menemukan pengaturan terhadap masalah penyidik. Menurut aktivitasnya, analisis data yaitu tindakan membuat informasi menurut faktor variabel dan jenis responden dan menggabungkan informasi faktor variabel semua responden. Menampilkan informasi dari faktor variabel yang dilakukannya pengamatan guna menentukan kejadian dan pengujian berdasarkan pengamatan.

Rancangan Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Regresi berganda dimaksudkan untuk memperkirakan seberapa besar variabel dependen naik atau turun ketika dua atau lebih variabel independen dimanipulasi sebagai faktor predator (naik atau turun nilainya). Oleh karena itu, karena penelitian ini memiliki lebih dari dua variabel bebas, maka akan dilakukan analisis regresi berganda. Ketika mengukur pengaruh variabel dengan beberapa variabel independen.

Statistik Deskriptif

Sudjana, (2015) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel dan atau diagram,

Karawang, 28 Februari 2023

yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Analisis deskriptif dilakukan untuk mencari harga simpangan baku, distribusi frekuensi, modus, mean, median dan pembuatan histogram dari skor yang diperoleh pada variabel.

Statistik deskriptif dipakai guna mendeskripsikan atau mengilustrasikan data keseluruhan yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai minimum, nilai maksimum serta standar deviasi dari masing-masing variabel yang terdapat didalam penelitian (Ka Tiong & Rakhman, 2021). Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan dapat memberikan gambaran awal tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3), dan Belanja Modal (Y).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah didalam sebuah model regresi linear *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah asumsi klasik. Regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik tersebut antara lain adalah:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Sminov, menurut Imam Ghozali(2018).

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen. Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance atau variance inflation factor (VIF). Model regresi akan bebas dari multikonearitas

jika nilai tolerance >0.10 atau jika VIF < 10 , menurut Ghozali, (2018)

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji model regresi linier apakah adakolerasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya) atau tidak. Jika terdapat kolerasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi. Cara mendeteksi problem autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW) kemudian membandingkan hasil uji dengan tabel Durbin Watson (DW).

- a. Bila $dW < dL$ maka terdapat autokorelasi negatif.
- b. Bila $dL \leq dW \leq dU$ atau $(4-dU) \leq dW \leq (4-dL)$ maka hasil ujinya adalah tanpa keputusan.
- c. Bila $dU \leq dW \leq (4-dU)$, maka tidak terdapat autokorelasi.
- d. Bila $dW \geq (4-dL)$ maka terdapat autokorelasi positif, Sugiyono, (2017).

d. Uji Heterokedastisitas

Uji Heterokedastisitas merupakan suatu keadaan terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Keadaan ini berarti bahwa varian dari setiap eror bersifat heterogen yang melanggar asumsi klasik bahwa syarat varians dari eror harus bersifat homogen. Seperti halnya masalah multikolinieritas, model regresi yang baik adalah model yang tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalamnya.

Analisis Linier Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ketergantungan variabel dependen Belanja Modal dengan satu atau lebih variabel independen PAD, DAU dan DAK dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan.

Model persamaan regresi linier berganda yang dapat dituliskan dalam bentuk

persamaan regresi sebagai berikut, Sugiyono, (2017):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	=	Belanja Modal
a	=	Konstanta/Intercept
B	=	Koefesien masing-masing variabel independen
X ₁	=	Pendapatan Asli Daerah
X ₂	=	Dana Alokasi Umum
X ₃	=	Dana Alokasi Khusus

e = Tingkat kesalahan/*standard error*

Koefisiensi Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016:97) Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menguji antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama. Pada intinya koefisien determinasi bertujuan untuk seberapa jauh mengukur variabel independen. Nilai R^2 yaitu antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.

Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Signifikansi koefisien parsial ini memiliki distribusi t dengan derajat kebebasan $n-k-1$, dan signifikan pada $f\tilde{N}=0,05$, Uji t atau Uji parsial digunakan untuk menguji secara parsial (terpisah atau individu) atau setiap satu per satu apakah Pendapatan Asli Daerah (X_1), Dana Alokasi Umum (X_2), Dana Alokasi Khusus (X_3) berpengaruh terhadap variabel Belanja Modal (Y) di Kota Jayapura Sugiyono, (2017).

Uji Simultan (Uji-f)

Pada pengujian secara simultan akan diuji pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian simultan adalah uji F. Untuk pengujian pengaruh parsial digunakan rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Jika Nilai signifikansi $> 0,05$ (a) atau F hitung $< F$ tabel berarti Hipotesis tidak terbukti maka H_0 diterima H_a Ditolak bila dilakukan secara simultan.
2. Jika Nilai signifikansi $< 0,05$ (a) atau F hitung $> F$ tabel berarti Hipotesis tidak terbukti maka H_0 diterima H_a Ditolak bila dilakukan secara simult

HASIL DAN LUARAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

Profil Lokus atau Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2017-2020 yang berada pada Diktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Gambaran umum objek penelitian ini menyajikan prosedur pemelihan atau kriteria sampel yang dipilih. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal.

Proses Pemilihan Sampel

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data skunder yang berasal dari LRA tahunan pemerintah sebanyak 27 sampel dengan jumlah 135 data penelitian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021 yang diperoleh melalui Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Metode pengambilan sampel *purposive sampel*. Hasil dari penelitian ini diperoleh melalui periode penelitian selama 5 tahun yang terhitung dari 2017-2021, kemudian dikalikan dengan jumlah sampel 27 Kabupaten/Kota yang telah memenuhi kriteria pemilihan sampel. Namun pada penelitian ini terdapat data ekstrim sehingga data tersebut menggunakan Logaritma Natural (LN) agar dapat menunjukkan data yang terdistribusi normal.

Tabel 5. 1

Kriteria Sampel

No	Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
1.	Kabupaten dan Kota	27
2.	Tahun Pengamatan	5
3.	Jumlah Sampel (27*5)	135
4.	<i>Missing data</i>	0
	Total sampel yang telah digunakan	135

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/hasil-olah-2022>

Hasil Pengujian Keabsahan Data

Sehubungan dengan data penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan data skunder, maka perlu memenuhi syarat yang telah ditentukan sebelum melakukan pengujian hipotesis yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali, (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah apakah dalam model regresi variable independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apakah tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan one sampel kolmogrov Smirnov yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika $sig < 0,05$ maka data tersebut berdistribusi tidak normal.
2. Jika $sig > 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal.

Karena dalam penelitian ini memiliki satuan yang berbeda maka data terlebih dahulu dilakukan perlakuan dengan trasformasi data atau mengubah data kedalam bentuk Logaritma Natural (LN) untuk memperkecil sekala data. Menurut Dedi Rosyadi (2012: 24)

Dibawah ini merupakan uji normalitas pada penelitian ini dengan menggunakan software SPSS versi 24, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Uji

Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.21944333
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.202
	Positive	.202
	Negative	-.064
Test Statistic		.202
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal

Berdasarkan pada tabel 5.2 di atas, hasil pengujian dari tingkat signifikan uji normalitas dengan sampel sebanyak 135 data memiliki nilai *Asymp.sig* sebesar 0,200 yaitu dengan hasil lebih dari 0,05 yang berarti data residu terdistribusi normal. Sehingga dapat disimpulkan *Asymp. Sig. (2-tailed)* menggunakan LN terdistribusi normal. Maka untuk selanjutnya menggunakan data setelah dilakukan Transformasi kedalam bentuk LN.

2. Uji Multikolineritas

Meneurut imam Ghozali, (2016) pengujian multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antarvariabel independen dalam model regresi uji multikolineritas diukur dengan nilai *tolerance* dengan VIF (*Variance Inflation Factor*).

1. Jika nilai toleransi $> 0,10$ dan $VIF < 10$, Maka dapat ditafsirkan bahwa tidak terjadi multikolineritas.
2. Jika nilai toleransi $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka dapat ditafsirkan bahwa terjadi multikolineritas.

Tabel 5. 3

Uji Multikolineritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.432	1.495		-.289	.773		
	PAD X1	.357	.041	.591	8.698	.000	.923	1.083
	DAU X2	.040	.060	.063	.659	.511	.474	2.111
	DAK X3	.658	.303	.201	2.169	.032	.499	2.004

a. Dependent Variable: Belanja Modal_Y

Sumber: SPSS versi 24 dan hasil olah 2022

Berdasarkan pada tabel 5.3 di atas, uji multikolineritas nilai tolerance semua variabel di atas 0,10 dan nilai VIF semua variabel di bawah 10.

Dengan

demikian, model regresi dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu regresi linear ada korelasi antara kesalahan pen gganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 pada (sebelumnya). Apabila terjadi korelasi, maka dinamakan suatu *problem* autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat digunakan dengan cara uji Durbin – Watson (DW test) Ghozali, (2016: 11).

Tabel 5. 4

**Uji Autokorelasi
 Model Summary^b**

model	R	R Square	adjusted R Square	Std. Error of the estimate	Durbin-Waston
1	.664 ^a	.441	.428	123.333	1.379

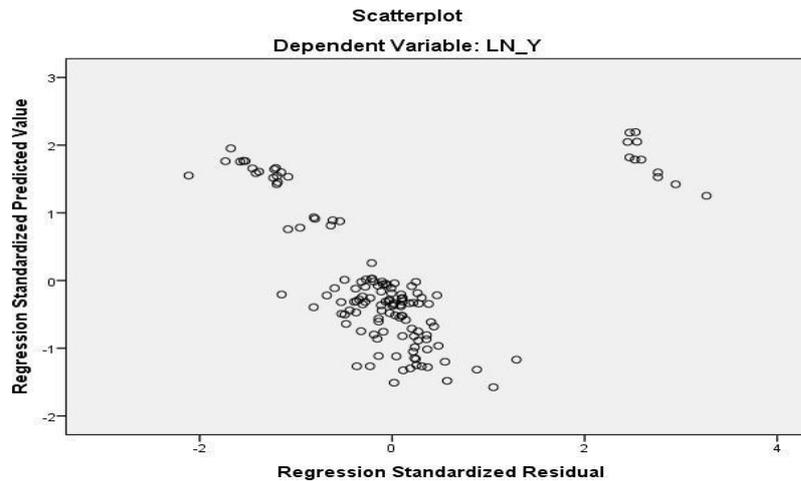
Sumber: SPSS versi 24 dan hasil olah 2022

Berdasarkan pada tabel 5.4 di atas hasil *output model summary* untuk di uji autokorelasi, diperoleh nilai DW sebesar 1,379. Setelah mencari nilai DU (batas dari *Durbin-Watson*) dan DL (batas bawah *Durbin-Watson*) pada tabel DW, didapatkan bahwa nilai DU sebesar 1,7624 dan DL sebesar 1,6696 dan dimana dikatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif jika $DW < DU$ $1379 < 1,7624$ maka dapat dikatakan bahwa data tersebut disebut dapat dikatakan data tersebut terjadi autokorelasi positif. Untuk mendeteksi tidak terjadinya autokorelasi negatif yaitu jika $(4-DW) >$ maka diperoleh $2,621 > 1,7624$ sehingga data tersebut tidak terjadi autokorelasi negatif. Dengan demikian tidak adanya autokorelasi dalam model ini terpenuhi.

4. Uji Heterosdastisitas

Dalam penelitian ini uji heterosdastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika varian residual satu pengamatan dan pengamatan lain

tetap, maka disebut heterosdastisitas dan jika berbeda disebut heterosdastisitas Ghozali, (2016: 137). Untuk mendeteksi ada tidaknya Heterodastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scarterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di *studentized* Ghozali, (2016: 138).



Gambar 5. 1

Scartterplot Uji Hetrodastisitas

Sumber: SPSS versi 24 dan dan hasil olah, 2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heterosdastisitas.

Selain dengan melihat grafik *scaratterplot*, untuk mendeteksi ada tidaknya heterodastisitas juga dapat dilakukan dengan cara melakukan uji *glejser* dengan meregres nilai *absolut residual* terhadap variabel independent dengan ketentuan nilai probabilitas signifikannya di atas kepercayaan 5% maka dapat dikatakan tidak terjadi heterosdastisitas dan sebaliknya Ghozali, (2016: 144). Hasil pengujian diperoleh sebagai berikut: 3

Tabel 5. 5

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	-.432		
	PAD X1	.357	.041	.591	8.698	.000
	DAU X2	.040	.060	.063	.659	.511
	DAK X3	.658	.303	.201	2.169	.032

**Uji Heterosdastisis
Coefficients^a**

a. Dependent Variable: Belanja Modal Y
 Sumber: SPSS versi 24 dan hasil olah 2022

Tabel 5.4 dengan jelas menunjukkan bahwa ada satu variabel independen yang tidak signifikan secara statistic mempengaruhi varoabel dependen nilai *absolut residual* (Abs_RES). Hal ini terlihat dari probabilitas. Dari output di atas, kita dapat melihat bahwa nilai signifikansi kedua variabel independen lebih besar dari 0,05. Dari sini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

Uji Normal, Analisis Verifikatif, dan Uji Hipotesis

1. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan satu persamaan. Model persamaan regresi linier berganda yang dapat dituliskan dalam bentuk persamaan regresi sebagai berikut, Sugiyono, (2017):

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Y = Belanja Modal

A = Konstanta/Intercept

- B = Koefesien masing-masing variabel independen
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Alokasi Umum
- X₃ = Dana Alokasi Khusus
- E = Tingkat kesalahan/*standard error*

Tabel 5. 6

Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.432	1.495		-.289	.773
	PAD X1	.357	.041	.591	8.698	.000
	DAU X2	.040	.060	.063	.659	.511
	DAK X3	.658	.303	.201	2.169	.032

a. Dependent Variable: Belanja Modal Y
 Sumber: SPSS versi 24 dan hasil olah 2022

Berdasarkan pada table 5.7 maka hasil yang diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut $Y = - 0,432 + 0,357X_1 + 0,040X_2 + 0,658X_3$. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Koefisien konstanta (*a*) sebesar – 0,432 dengan nilai negatif. Artinya bila Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sama dengan nol (0) maka Belanja Modal mengalami penurunan sebesar 0,432.
- b. Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki koefisien regresi sebesar 0,357 dengan nilai positif. Jika setiap kenaikan satu variabel Pendapatan Asli Daerah dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap, maka akan naik sebesar 0,357
- c. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki koefisien regresi sebesar 0,040 dengan nilai positif. Jika setiap kenaikan satu variabel Dana Alokasi Umum dengan variabel lainnya tetap, maka akan naik sebesar 0,040.

d. Variabel Dana Alokasi Umum memiliki koefisiensi regresi sebesar 0,658 dengan nilai positif. Jika setiap kenaikan satu variabel Dana Alokasi Khusus dengan Variabel lainnya tetap, maka akan naik sebesar 0,658.

2. Analisis Koefisiensi Determinasi (R^2)

Menurut Ghazali (2016:97) Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk menguji antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama. Pada intinya koefisien determinasi bertujuan untuk seberapa jauh mengukur variabel independen. Nilai R^2 yaitu antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil. Hasil Koefisiensi Determinasi sebagai berikut:

Tabel 5. 7
Analisis Koefisiensi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin - Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.664 ^a	.441	.428	1.23333	.441	34.435	3	131	.000	1.379

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU dan DAK

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: SPSS versi 24 dan hasil olah 2022

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai *adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0.441. Dilihat dari hasil tersebut artinya kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Sebesar 44,1% terhadap Belanja Modal, sedangkan sisanya sebesar 55,9% nilai perusahaan dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Tujuan dari uji hipotesis ini adalah menetapkan suatu dasar sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data-data dalam menentukan keputusan apakah menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat.

a. Uji Hipotesis Hubungan Parsial (Uji-t)

Uji t digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas/independen, yang di uji dengan sigifikasi $\alpha = 0,05$ artinya kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai propabilitas 95% atau toleransi kemelesatan 5%. Jika nilai *probability* t lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen Ghozali (2016, 99). Berikut adalah hasil uji parsial yang diperoleh.

Tabel 5. 8

Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.432	1.495		-.289	.773
	PAD X1	.357	.041	.591	8.698	.000
	DAU X2	.040	.060	.063	.659	.511
	DAK X3	.658	.303	.201	2.169	.032

a. Dependent Variable: Belanja Modal Y
 Sumber: SPSS versi 24 dan hasil olah 2022

Berdasarkan tabel di atas, uji parsial dilakukan dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel, taraf signifikan 5% dengan $df = n - 2$ yaitu $135 - 2 = 132$ (n adalah jumlah sampel data). Dilihat dari t-tabel maka diperoleh t-tabel sebesar 1,66639. Berdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji hipotesis variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) diperoleh t-hitung sebesar 8,698 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t-tabel sebesar 1,66639. Hasil tersebut menyatakan bahwa t-hitung > t-tabel ($8,698 > 1,66639$) dan tafsiran signisikasi menyatakan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal. **H_1 diterima**
2. Berdasarkan uji hipotesis veriabel Dana Alokasi Umum (X_2) diperoleh t-hitung sebesar 0,659 dengan nilai signifikansi sebesar 0,511 dengan t-tabel

sebesar 1,66639. Hasil tersebut menyatakan bahwa $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($0,659 < 1,66639$) dan tafsiran signifikansi menyatakan $0,511 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara persial Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Belanja Modal. **H₂ ditolak**

3. Berdasarkan uji hipotesis variabel Dana Alokasi Khusus (X_3) diperoleh $t\text{-hitung}$ sebesar 2,169 dengan nilai signifikansi sebesar 0,032 dengan $t\text{-tabel}$ sebesar 1,66639. Hasil tersebut menyatakan bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,169 > 1,66639$) dan tafsiran signifikansi menyatakan $0,032 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa secara persial Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Belanja Modal. **H₃ diterima**

a. Uji Hipotesis Hubungan Simultan (Uji F)

Ghazali (2016: 96) menjelaskan bahwa uji F digunakan untuk menguji semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terkait. Pengujian dilakukan dengan signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil uji simultan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5. 9

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	157.135	3	52.378	34.435	.000 ^b
	Residual	199.264	131	1.521		
	Total	356.399	134			

a. Dependen Variabel: Belanja Modal

b. Predictors: (constant), PAD, DAU, DAK

Sumber: SPSS versi 24 dan hasil olah 2022

Berdasarkan tabel 5.9 di atas di peroleh nilai F hitung sebesar 34,435 nilai signifikansi 0,000. Dari hasil tersebut dapat diketahui nilai F-tabel sebesar 3,91, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, dibuktikan dengan $0,000 < 0,05$. **H₄ diterima**

Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian maksimum, minimum, sun Ghozali, (2016: 19).

Tabel 5. 10

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD X1	135	4.62	12.82	7.5658	2.70561
DAU X2	135	5.85	12.28	9.9925	2.57294
DAK X3	135	4.56	6.86	5.9150	.49746
Belanja Modal Y	135	4.73	12.04	6.5520	1.63086
Valid N (listwise)	135				

Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

Sumber: SPSS versi 24 dan hasil olah 2022

Berdasarkan tabel 5.10 di atas menunjukkan bahwa N merupakan jumlah banyaknya data yang digunakan sebanyak 135 data. Berikut hasil dari uji statistik deskriptif yang sudah terlampir pada tabel 5.10.

a. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel 5.10 di atas dapat diketahui bahwa dari 135 data yang ada variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai nilai minimum 4,62% dan nilai maksimum 12,82% dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 75,658%, dan nilai standar 270,561%.

b. Dana Alokasi Umum

Berdasarkan tabel 5.10 di atas dapat diketahui bahwa dari 135 data yang ada variabel Dana Alokasi Umum mempunyai nilai minimum 5,85% dan nilai maksimum 12,28% dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 99,925% dan nilai standar 257,294%.

c. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan tabel 5.10 di atas dapat diketahui bahwa dari 135 data yang ada variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai minimum 4,56% dan nilai maksimum 6,86% dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 59,150% dan nilai standar 0.49746%.

d. Belanja Modal

Berdasarkan tabel 5.10 di atas dapat diketahui bahwa dari 135 data yang ada variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai minimum 4,73% dan nilai maksimum 12,04% dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 65,520% dan nilai standar 163,086%.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, sesuai data yang telah diperoleh maka diketahui hubungan antar variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang terdapat pada Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan baik uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas dimana asumsi tersebut telah terpenuhi. Sehingga layak untuk digunakan menganalisis maka penjelasan mengenai hasil penelitian sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa menunjukan hasil secara persial variabel Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021. Hal ini berkaitan dengan teori federasi fisik, yang dimana menunjukan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal meningkat yang dapat memberikan manfaat untuk menunjang fasilitas publik melalui pembanguna sarana dan prasarana terutama pembangunan insfaktuktur, peningkatan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk meningkatkan pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah agar tercapainya desentralisasi. Sumber utama yang digunakan untuk mendanai Belanja Modal salah satunya Pendapatan Asli Daerah. Dengan ditemukanya penelitian ini, diharapkan Kabupaten/Kota dapat menggali potensi penerimaannya secara maksimal dan membangun perekonomian.

Penelitian ini mendukung hasil dari penelitian sebelumnya oleh Siti Hajar Asmawiah, (2022) yang menunjukan bahwa adanya hubungan searah antara Pendapatan Asli Daerah jika meningkat maka Belanja Modal ikut meningkat begitupun sebaliknya. Selain itu, yang mendukung penelitian ini adalah Made Ari Juniawan, (2018): Subowo et al (2019); Meltia, (2021); Safiul Huda, (2019) yang menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti &

Rahayu, (2021) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh secara signifikan

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t bahwa menunjukkan hasil secara persial variabel Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2017-2022. Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum yang tidak seimbang dengan keefektifan tata kelola bagi pembangunan daerah akan lebih banyak digunakan untuk pendanaan pilkada pada tahun 2019, alokasi dana tidak diperuntukan untuk memaksimalkan pelayanan publik, sehingga membuat Belanja Modal kurang efisien atau kurang dimaksimalkan. Karena semakin besarnya Dana Alokasi Umum belum tentu dapat meningkatkan Belanja Modal.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian oleh Afrah Junita et al, (2021), yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Selain, itu yang mendukung penelitian ini adalah Novianti & Rahayu (2021). Namun, pada penelitian Meltia, (2021); Pramudita (2020); dan Made Ari Juniawan menyatakan bahawa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa menunjukkan hasil secara persial variabel Dana Alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Hal ini memberikan indikasi bahwa perilaku Belanja Modal dipengaruhi penerimaan Dana Alokasi Khusus, dengan mengeluarkan Dana Alokasi Khusus, mungkinkan untuk mengurangi beban biaya yang harus di tanggung khusus oleh Kabupaten/Kota. Dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang diwujudkan dengan Belanja Modal.

BAB VI

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Penelitian ini banyak sekali kekurangannya untuk itu rencana tahapan berikutnya peneliti akan mengolah data dari angket tambahan yang belum terkumpul dengan analisis SPSS dan mengambil objek yang lebih luas lagi.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat periode tahun 2017-2021 diperoleh 27 sampel Kabupaten/Kota dengan 135 dengan menggunakan Logaritma Natural (LN), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara persial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021. Artinya, semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal ikut meningkat.
2. Secara persial variabel Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021. Artinya, semakin tingginya Dana Alokasi umum belum tentu meningkatkan Belanja Modal.
3. Secara persial Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2017-2021. Artinya, Dana Alokasi Khusus bertujuan meningkatkan pelayanan publik dalam wujud Belanja Modal.
4. Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Artinya, secara kuantitatif dapat dikatakan bahwa setiap terjadi perubahan alokasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus dari tahun ke tahun maka akan diikuti pula oleh berubahnya Belanja Modal.

IMPLIKASI

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi sebaiknya mengoptimalkan peningkatan pelayanan guna memaksimalkan Belanja Modal sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat, serta mampu memaksimalkan pengalokasian sehingga Kabupaten/Kota dapat maksimal dalam memajukan daerahnya baik dalam sarana dan prasarana pelayanan publik, dan dapat memanfaatkan semaksimal mungkin alokasi dana sehingga dapat meningkatkan alokasi belanja modal dan menurunkan kemiskinan.

2. Bagi Pembaca

Bagi pembaca hasil dari penelitian menambah wawasan serta pengetahuan terkait Belanja Modal terkait faktor yang mempengaruhinya. Sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian ini sebagai referensi diharapkan agar dapat memperluas dan menambahkan variabel independen seperti DBH, SILPA, Pertumbuhan Ekonomi, yang dapat mempengaruhi Belanja Modal. Sehubungan penelitian ini dilakukan di Provinsi Jawa Barat, untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas subjek penelitian tidak hanya di tingkat Provinsi, namun se-Indonesia dan dapat menggunakan periode Penelitian lebih dari 5 tahun sehingga dapat menggambarkan kondisi sebenarnya Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. In Jakarta: Selemba Empat.
- Amin, M., Hariri, dan, & Islam Malang, U. (n.d.). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2018-2019)* (Vol. 10).
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Asmawiah, S. H., & Sulistiyo, H. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2020*. 6, 4150–4157.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2020). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), 2018-2020*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>
- BPK. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–73. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>
- Dea, R., Rm, C., & Mulyani, H. (n.d.). *Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Dengan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Barat*.
- DPRRI. (2004). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH*. 55. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Edison, Emron. Yohny anwar, I. komariyah. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Efendi, R., & Zamrud, I. (n.d.). Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. *Djpb.Kemenkeu.Go.Id*. https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/images/file_artikel/file_pdf/kfr/tw3_2019.28_kfr_tw3_2019_sultra.pdf
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Huda, S., Sumiati, A., & Jakarta, U. N. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100. <https://doi.org/10.21009/wahana.014.1.6>
- Imam Gozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.Edisi V*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Jati, K., Subowo, S., Ilmiyana, W., & Sari, M. (2019). The Effects of PAD, DAU, and Employee Expenses on Capital Expenditures with Population Density as a

- Moderating Variable. *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 11(2), 132–140.
<https://doi.org/10.15294/jda.v11i2.21004>
- Jemparut, M. S. (2017). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM PADA BELANJA MODAL* Akhmad Riduwan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 6(32).
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. P. S. (2018). PENGARUH PAD, DAU DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL KOTA DAN KABUPATEN DI PROVINSI BALI. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3), 1255.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p05>
- Ka Tjong, & Rakhman, F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Buana Akuntansi*, 6(1), 67–82.
<https://doi.org/10.36805/akuntansi.v6i1.1364>
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahasiswa, J., & Samudra, A. (2021). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA LANGSA* (Vol. 2, Issue 2).
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- N, A. A. F. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.
<https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Noviarti, H., & Rahayu, S. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI INDONESIA (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5300–5306.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Pendapatan Asli Daerah, P., Alokasi Umum, D., & Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal, D. (2018). The Influence of Local Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK) on Capital Expenditure. In *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis* (Vol. 9, Issue 2).
- Perimbangan, & Keuangan Daerah, D. J. (2016). *DAU.pdf*.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAU.pdf>
- Perimbangan, & Keuangan Daerah, D. J. (2016). *Pengertian Dana Alokasi Khusus* (p. 3).
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/01/DAK.pdf>
- Permatasari, I. (n.d.). *PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR* Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Presiden RI. (1999). Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1–70.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45329/uu-no-22-tahun-1999>

- Prosiding KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 Universitas Islam 21642-1-56486-1-10-20170314 (1)*. (n.d.).
- Pusat, P. (2005). Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. *09 Desember*, LN. 2005 No. 137, TLN No. 4575 LL SETNEG : 32 HLM. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>
- Rachmawati, M. (n.d.). *PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat)*. www.djkd.depkeu.go.id.
- Setiawati, H. & Dana, P., Umum, A., Khusus..., D. A., Hidayah, N., & Setiyawati, H. (n.d.). *PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP*.
- Siagian, A. onny. (2020). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA TRANSFER TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL. *Jurnal Bisnis Terapan*, 4(2), 141–158. <https://doi.org/10.24123/jbt.v4i2.2848>
- Siregar. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudaryono. (2017). Pengantar Manajemen: Teori dan Kasus. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Sudjana, Nana. (2016). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung :PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV. <https://massugiyantojambi.wordpress.com/2011/04/15/teori-motivasi/>